

KLIPING BERITA

Sumber : Lombok Post

07 Juni 2022

BPK Temukan Penyimpangan Anggaran Rp 8,4 M Pembangunan Masjid Agung Bima

Editor: Galih Mps  7 Juni 2022



DIDUGA BERMASALAH: Pembangunan Masjid Agung Bima sudah selesai. Tetapi BPK NTB menemukan ada potensi kerugian daerah Rp 8,4 miliar. (ISTIMEWA/LOMBOK POST)

BIMA-Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB pada pembangunan Masjid Agung Kabupaten Bima cukup fantastis. Proyek yang dikerjakan PT Brahmakerta Adiwira KSO PT Budimas dengan anggaran Rp 78 miliar itu diduga bermasalah.

Lembaga auditor itu menemukan dugaan penyimpangan anggaran Rp 8,4 miliar. Rinciannya, denda keterlambatan pekerjaan Rp 832.075.708; kekurangan volume pekerjaan konstruksi Rp 497.481.748; dan kelebihan pembayaran PPN Rp 7.092.727.273.

Pemkab Bima pun dibuat kaget dengan angka temuan BPK. Mereka merasa temuan itu tidak adil dan meminta untuk dikoreksi. "Permintaan kami dikoreksi, biar adil. Ini menurut kami tidak adil. Pekerjaan fisik yang sudah 97 persen malah dihitung nol persen," kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bima Taufik ST dihubungi *Lombok Post*, kemarin.

Dia mengawali penjelasan soal temuan pajak. Taufik mengaku, pihaknya diminta kepala Kantor Pajak Bima untuk membayarnya. Awalnya, dia dan anak buahnya ragu, sehingga mereka menyurati Kanwil Pajak dan BPKP NTB. "Kami dapat dapat jawaban dari dua lembaga ini dan jawaban itu saya bawa ke BPK. Jadi BPKP sebenarnya tidak menemukan temuan itu," jelasnya.

Taufik membawa surat jawaban dari dua lembaga itu dan menyerahkan kepada auditor BPK. Di situ, dia berdiskusi dan menyerahkan dokumen, bahkan dia meminta agar dicatatkan sebagai temuan supaya pajak Rp Rp 7 miliar dikembalikan.

"Jadi yang melakukan penagihan nanti adalah perusahaan pelaksana. Kami hanya bisa minta perusahaan restitusi pajak atau penagihan kembali pajak yang dibayar," jelasnya.

Soal kekurangan volume, Taufik mengungkapkan, sempat menjadi perdebatan panjang dengan BPK. Pihaknya menyampaikan kalau beberapa item pekerjaan, ada yang lebih dan kurang. "Kalau dihitung lebihnya, mungkin lebih banyak lebihnya daripada kurangnya," ketus dia.

Meski sempat jadi bahan perdebatan, Taufik tidak mempermasalahkan kekurangan volume pekerjaan itu. Sehingga diputuskan perusahaan pelaksana membayar kekurangan tersebut. "Sudah kami putuskan agar tidak menimbulkan interpretasi macam-macam. Kami minta kontraktor untuk bayar kekurangan tersebut," ujar Taufik.

Masalah denda keterlambatan pekerjaan, Taufik masih sulit untuk menerima temuan BPK. "Masalah denda, hitung-hitungan kita hanya Rp 57 juta. Tapi kami kaget begitu keluar hasil perhitungan BPK Rp 800 juta lebih. Ini cukup mengagetkan," sebutnya.

Menurut Taufik, keterlambatan ini sebenarnya pekerjaan yang sengaja ditunda. Misalkan pengerjaan seluruh pasangan bata dinding bangunan masjid, mulai dari lantai dasar hingga lantai tiga senilai Rp 2,5 miliar. Tetapi sampai menjelang akhir pekerjaan, ada satu bidang dinding bagian selatan masjid yang tidak dikerjakan. Alasannya, dinding itu menjadi pintu keluar masuk kendaraan yang membawa material bangunan.

Karena alasan itu, pengerjaan dinding tunda. Meski ditunda, dia menegaskan, tetap akan menjadi tanggung jawab kontraktor untuk diselesaikan. "Gara-gara, tidak dikerjakan satu bidang tembok itu ukuran 4x6 meter, akhirnya didenda semua pekerjaan dinding di lantai dasar, lantai dua, dan lantai tiga. Didenda 100 persen Rp 2,5 miliar," ucapnya heran.

Persoalan ini diperdebatkan Taufik dengan BPK. Tentu saja, menurut dia, BPK punya alasan sendiri sehingga memunculkan angka temuan sebesar itu. "Kita minta yang didenda itu hanya yang tidak dikerjakan satu bidang itu. Karena pengerjaan pemasangan bata sudah 97 persen, kekurangan sekitar 3 persen saja," klaimnya.

Pengecatan tembok dan plafon juga salah satu item yang menjadi temuan BPK. Dia mengatakan, pekerjaan itu sudah selesai hampir 100 persen. "Tetapi hitungan BPK didenda 100 persen. Nilainya sangat fantastis Rp 500 juta-Rp 600 juta," bebarnya.

Pekerjaan instalasi listrik tak luputan dari catatan lembaga auditor yang bermarkas di Udayana, Kota Mataram. Taufik menjelaskan, semua bohlam lampu yang tidak bisa dijangkau dengan tangan sudah terpasang. "Tetapi posisi lampu yang bisa dijangkau tangan kita larang dipasang, tetapi barangnya ada. Karena kami khawatir lampu akan dicuri. Itu juga dihitung 100 persen tidak terpasang," kata dia.

Begitu juga sound system. Semua sound di lantai atas masjid sudah dipasang. Seperti kabel instalasi dan power. Taufik membeberkan, pihaknya memang belum memasang subwoofer yang terpasang di dinding setinggi kepala manusia. Karena khawatir dicuri. "Kami pasang enam biji subwoofer untuk uji coba. Suaranya cukup bagus. Kami sisakan dua dari 12 subwoofer. Kekurangan itu dihitung semua belum terpasang," ungkapnya.

Begitu juga sound system. Semua sound di lantai atas masjid sudah dipasang. Seperti kabel instalasi dan power. Taufik membeberkan, pihaknya memang belum memasang subwoofer yang terpasang di dinding setinggi kepala manusia. Karena khawatir dicuri. "Kami pasang enam biji subwoofer untuk uji coba. Suaranya cukup bagus. Kami sisakan dua dari 12 subwoofer. Kekurangan itu dihitung semua belum terpasang," ungkapnya.

Sehingga akumulasi kekurangan pekerjaan yang dianggap belum selesai, menurut BPK sebesar Rp 10 miliar. "Sesungguhnya itu bukan pekerjaan yang kurang. Tetapi ini total pekerjaan yang belum selesai. Bukan pekerjaan sama sekali yang belum dikerjakan," kata dia.

Mengenai temuan ini, Taufik mengaku belum menyerah. Dia telah meminta agar disidangkan Inspektorat Bima. Karena menurut versinya, keseluruhan item yang belum dikerjakan hanya 0,08 persen. "Artinya yang sudah dikerjakan 99,9 sekian persen fisiknya. Di sini ada sudut pandang yang berbeda. Soal denda, sampai saat ini, kami belum diterima," tandasnya. **(jlo/r8)**